

# **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)**

**As Syifa Nurillah, Dul Muid<sup>1</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

## **ABSTRACT**

*This research was conducted to determine the factors that affect the quality of local government financial reports . The factors studied were the effects of Human Resources competencies , the application of Financial Accounting System , the utilization of information technology , and Internal Control System .Collecting data this research used a questionnaire survey. The questionnaire was delivered to 100 employees working units (SKPD ) Depok city in financial/ accounting division, total of 64 questionnaires ( 64 % ) returned complete and can be processed . The data collected were processed using SPSS version 21.0. The statistical methods used to test the hypotheses is multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing is human resource competency, Local Financial Accounting System implementation, utilization of information technology, and systems of internal control the government has a significant positive effect on the quality of local government financial reports..*

*Keywords: quality of financial reporting , human resource competency, financial accounting systems, information technology, internal control system.*

## **PENDAHULUAN**

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi yang sangat vital. Salah satu fungsinya ialah laporan keuangan merupakan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Akuntabilitas dinilai sangat penting dalam mewujudkan *good government*. Hal itu dilakukan melalui laporan keuangan yang telah diaudit secara profesional. Di kebanyakan negara berkembang, perhatian utama terhadap *good governance* dalam hubungan dengan penggunaan otoritas dan manajemen sektor publik, adalah korupsi yang cenderung menjadi karakter tipikal

---

<sup>1</sup> *Corresponding author*

yang melekat. Bahkan di beberapa negara terbukti bahwa budaya korupsi telah begitu melekat di dalam birokrasi pemerintah yang justru ditandai oleh kelangkaan sumber daya.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2007-2011 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin meningkat, wajar dengan pengecualian (WDP) tidak memiliki banyak perubahan, opini tidak wajar (TW), bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 - 2011**

LKPD (tahun)	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	7%	341	65%	26	5%	121*	23%	522
2011	67	13%	349	67%	8	2%	96	18%	520

\*Pemeriksaan 2 LKPD Tahun 2010 yaitu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012

(Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS II Tahun 2012)

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2007, dinyatakan bahwa terhadap 469 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 4 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 283 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 59 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 123 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2007, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 2008 sebanyak 13 entitas, dan tahun 2009 sebanyak 15 entitas.

Pada tahun 2012, Jawa Barat dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula di daerah Jawa Barat, hanya Kota Depok dan Kota Banjar yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya (<http://economy.okezone.com/read/2013/05/28/320/814042/depok-dan-banjar-dapat-opini-wtp-dari-bpk>). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada salah satu kota di daerah Jawa Barat tersebut.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi. Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif. Hal ini didukung penelitian Zuliarti (2012) yang mengatakan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Namun demikian, hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Roviyantie (2011) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi pelaporan keuangan. Sejalan dengan Roviyantie (2011), penelitian Tantri (2012) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011). Berdasarkan teori keagenan, terdapat dua macam hubungan keagenan, yakni hubungan keagenan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah daerah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, transparansi melalui laporan keuangan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), dan sistem pengendalian intern.

### Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Studi yang dilakukan Roviyantie (2011) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini:

$H_1$  : *Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

### Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

*H<sub>2</sub> : Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

*H<sub>3</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

*H<sub>4</sub> : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

## **METODE PENELITIAN**

### **Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei dengan kuesioner. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan kriteria pejabat struktural dan aparat yang memiliki peran dalam proses penyusunan laporan keuangan dan memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan karena anggaran disusun secara periodik dan dalam satu periode anggaran adalah satu tahun. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Depok. Hal ini dikarenakan Jawa Barat berdasarkan laporan hasil evaluasi laporan keuangan daerah pada tahun 2012 mendapat capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula di daerah Jawa Barat, hanya Kota Depok dan Kota Banjar yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya.

### **Variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan, variabel kompetensi SDM, variabel penerapan sistem akuntansi keuangan, variabel pemanfaatan teknologi informasi, dan variabel sistem pengendalian intern.. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut, diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu dan telah banyak digunakan peneliti sebelumnya.

Variabel kualitas laporan keuangan diukur menggunakan kuesioner dengan 8 pertanyaan yang dikembangkan oleh Xu, *et al.* (2003). Variabel tersebut diukur menggunakan skala lima poin atau skala likert, di mana skala rendah (1) menunjukkan rendahnya kualitas laporan keuangan dan skala tinggi (5) menunjukkan tingginya kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan kuesioner dengan 7 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diukur menggunakan kuesioner dengan 8 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diukur menggunakan kuesioner dengan 6 pertanyaan dengan skala Likert 1-5.

Sistem Pengendalian Intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya (Arens, dkk 2008). Pengendalian Internal yang dikeluarkan COSO terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian dan informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sistem pengendalian Intern diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ramandei (2009). Jumlah item pertanyaan adalah 5 item dengan skala Likert 1-5.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok, Jawa Barat. Untuk menentukan responden, metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode ini menciptakan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan agar informasi tiap sampel individu tepat sasaran. Metode *purposive sampling* digunakan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari empat pengujian, yakni uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji model. Uji kualitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang diperoleh dapat dikatakan sesuai. Kualitas data yang dihasilkan dari jawaban responden dapat berdampak pada ketepatan uji hipotesis. Uji kualitas data pada penelitian ini meliputi uji reliabilitas dan uji validitas. Uji statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data. Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai data melalui rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah tidak terdapat penyimpangan serta terdistribusi normal. Uji model terdiri dari uji koefisien determinasi, uji regresi berganda, dan uji t. Uji regresi digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Adapun persamaan regresi untuk seluruh variabel adalah sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 \text{SDM} + \beta_2 \text{SAKD} + \beta_3 \text{TI} + \beta_4 \text{SPI} + e$$



Keterangan:

- KLK : Kualitas laporan keuangan  
SDM : Kompetensi sumber daya manusia  
SAKD : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  
TI : Pemanfaatan teknologi informasi  
SPI : Sistem pengendalian intern  
e : *error*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 14 kuesioner. Kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 64 kuesioner. Perhitungan tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam Tabel 2. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 64%. Kuesioner yang tidak kembali 22%. Dengan demikian, data tersebut sudah mencukup sebagai ukuran sampel untuk tujuan analisis dan telah memiliki sifat-sifat bentuk distribusi normal (Wonacot dan Wonacot, 1995 dalam Abdullah, 2004). Penyebaran responden atas kuesioner yang dapat diteliti cukup merata, yakni 2-3 kuesioner di 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Depok. Sebanyak 54,7% responden adalah pria. Sebagian besar responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 48,4% dan memiliki pengalaman minimal satu tahun dibidang keuangan atau akuntansi sebanyak 61%.

**Tabel 2**  
**Daftar Kuesioner**

Item	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuesioner yang disebar	100	100%
Jumlah Kuesioner yang pengisian jawaban tidak lengkap	14	14%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	22	22%
<b>Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel)</b>	<b>64</b>	<b>64%</b>

Sumber : data primer diolah, 2013.

Objek penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan dan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam pengambilan keputusan anggaran SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Tidak hanya itu, ia juga harus memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun dibidang tersebut.

Dari 100 kuesioner yang disebar, terdapat 22 kuesioner yang tidak kembali dan 14 kuesioner yang tidak diisi secara lengkap sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti. Total kuesioner yang digunakan adalah sebanyak 64 buah. Penyebaran responden atas kuesioner yang dapat diteliti cukup merata, yakni 2-3 kuesioner di 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Depok. Sebanyak 54,7% responden adalah pria. Sebagian besar responden memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 48,4% dan memiliki pengalaman minimal satu tahun dibidang keuangan atau akuntansi sebanyak 61%.

### Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan analisis *bivariate* yakni melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk. dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk *degree of freedom* ( $df = n-2$ ), dalam hal ini adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini, jumlah sampel (*n*) adalah 64, sehingga besarnya *df* yaitu  $64-2 = 62$ , dengan signifikansi 5% didapat *r* tabel = 0,2461. Apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid.

Sementara uji reliabilitas dimaksudkan untuk menentukan tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan terhadap kesungguhan jawaban yang diterima. Uji reliabilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60

(Ghozali, 2006). Berdasarkan tabel 3, nilai *Cronbach Alpha* diketahui lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0,715
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,872
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	0,716
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,830
Sistem Pengendalian Intern	0,617

Sumber : data primer diolah, 2013

**Analisis Statistik Deskriptif**

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4. Rentang teoritis didapatkan dari nilai asli kuesioner. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki 7 item pertanyaan, variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dengan 8 item pertanyaan, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki 6 item pertanyaan, variabel sistem pengendalian intern memiliki 5 item pertanyaan, dan variabel kualitas laporan keuangan memiliki 8 item pertanyaan. Sedangkan rentang aktual didapatkan dari jawaban responden.

Dari tabel tersebut dapat dilihat variabel kompetensi SDM memiliki rata-rata empiris sebesar 24,92 termasuk kategori sedang. Maka bisa disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok memiliki sumber daya manusia sedang atau cukup. Kemudian variabel penerapan sistem akuntansi keuangan memiliki rata-rata empiris sebesar 30,64 termasuk kategori tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok menerapkan sistem akuntansi keuangan diatas rata-rata atau baik. Variabel ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi memiliki rata-rata empiris sebesar 24,16 termasuk kategori tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok memanfaatkan teknologi informasi diatas rata-rata atau baik. Selanjutnya variabel sistem pengendalian intern memiliki rata-rata empiris sebesar 18,06 termasuk kategori sedang, maka bisa disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok memanfaatkan teknologi informasi dinilai cukup. Variabel yang terakhir yaitu kualitas laporan keuangan memiliki rata-rata empiris sebesar 30,45 termasuk kategori tinggi, maka bisa disimpulkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok menerapkan sistem akuntansi keuangan diatas rata-rata atau baik

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	Rentang Teoritis			Rentang Aktual				Ket
	Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	Std. Dev	
Kompetensi SDM	7	35	21	15	28	24,92	3,852	Sedang
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8	40	24	23	39	30,64	3,098	Tinggi
Pemanfaatan Teknologi Informasi	6	30	18	13	30	24,16	3,414	Tinggi
Sistem Pengendalian Intern	5	25	15	14	22	18,06	2,246	Sedang
Kualitas Laporan Keuangan	8	40	24	23	39	30,45	3,096	Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Menurut Wulandari (2011), rentang kategori skor dihitung pada nilai maksimal (rentang teoritis) dikurangi nilai minimal (rentang teoritis). Setelah dikurangi, hasil dari pengurangan tersebut dibagi tiga karena ada tiga rentang kategori, setelah dibagi tiga, kemudian hasil bagi tersebut ditambahkan dengan nilai minimal sehingga hasil akhirnya adalah nilai maksimal. Berdasarkan rumus tersebut, maka rentang kategori skor variabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Kategori Skor Variabel**

Variabel	Rentang Kategori		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Kompetensi SDM	7 – 16,33	16,34 – 25,67	25,68 – 35
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	8 – 18,67	18,68 – 29,35	29,36 – 40
Pemanfaatan Teknologi Informasi	6 – 14	14,01 – 22,01	22,01 – 30
Sistem Pengendalian Intern	5 – 11,67	11,68 – 18,35	18,36 – 25
Kualitas Laporan Keuangan	8 – 18,67	18,68 – 29,35	29,36 – 40

Sumber : data primer diolah, 2013

### Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan tiga jenis uji asumsi klasik yang mendasari model analisis regresi, yaitu pengujian multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF, pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *grafic plots*. Selanjutnya pengujian normalitas dengan menggunakan *normal probability plot*.

Hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 6 menunjukkan tidak satu pun variabel yang menunjukkan nilai VIF di atas 10, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel-variabel tersebut (Ghozali, 2002). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji *glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model penelitian tersebut (Ghozali, 2006). Hasil pengujian pada tabel 6, memperlihatkan bahwa semua variabel independen untuk model penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi dalam penelitian ini.

Salah satu cara untuk mengetahui normalitas data adalah dengan menggunakan *normal probability plot*. Selain itu, uji normalitas dapat diuji statistik menggunakan *Nonparametric Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S)*. Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas dan Heterokedastisitas**

Variabel Independen	Variabel Dependen	Collinarity Statistics		Asymp. Sig.
		Tolerance	VIF	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kualitas Laporan Keuangan	0,777	1,286	,815
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan		0,731	1,368	,975
Pemanfaatan Teknologi Informasi		0,909	1,100	,283
Sistem Pengendalian Intern		0,975	1,026	,276

Sumber : Data primer yang diolah, 2013



**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,21580266
	Absolute	,152
Most Extreme Differences	Positive	,152
	Negative	-,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,215
Asymp. Sig. (2-tailed)		,104

Sumber : Data primer diolah, 2013

### Uji Model

Uji model pada penelitian ini meliputi uji koefisien determinasi dan uji regresi berganda. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Pengolahan data yang dilakukan memberikan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,453. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen (kualitas laporan keuangan) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern) sebesar 45,3%. Sedangkan sisanya 54,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Uji regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Tabel 8 berikut menunjukkan hasil uji regresi linier berganda.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,448	4,613		2,048	,045
SDM	,186	,085	,232	2,193	,032
1 SAK	,548	,109	,549	5,036	,000
TI	,198	,089	,218	2,231	,029
SPI	-,289	,130	-,210	-2,220	,030

Sumber : Data primer diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas maka persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$KLK = 9,448 + 0,186 \text{ SDM} + 0,548 \text{ SAKD} + 0,198 \text{ TI} - 0,289 \text{ SPI} + e$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

1. Konstanta sebesar 9,448 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari ketiga variabel independen dan faktor lain, maka variabel kualitas laporan keuangan (KLK) pada satuan kerja perangkat daerah kota Depok adalah 9,448.
2. Koefisien regresi variabel kompetensi SDM 0,186. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,186 atau sebesar 18,6% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien regresi penerapan sistem akuntansi keuangan 0,548. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan sistem akuntansi keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,548 atau sebesar 54,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,198. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,198 atau sebesar 19,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

5. Koefisien regresi pengendalian intern bernilai 0,289. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan pengendalian intern akuntansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,289 atau sebesar 28,9% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

### Pembahasan Hasil Penelitian

Uji parameter individual atau uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 6, menunjukkan bahwa keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk keempat variabel kurang dari 0,05.

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki koefisien regresi 0,2193 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol ditolak sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi SDM maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan kerangka pemikiran yang menyatakan bahwa karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompentensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011). Hasil pengujian tersebut ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunisah (2008), Roviyantie (2011), dan Arifianti (2011).

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5,036 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ini berarti hipotesis kedua dapat diterima. Menurut Abdul Halim, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi (2002 : 37). Pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Agus Mulyanto, 2009). Dengan demikian, semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Roviyantie (2011).

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,231 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ini berarti hipotesis nol ditolak yang berarti hipotesis ketiga dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Celviana, 2010). Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Indriasari dan Nahartyo (2008), Arifianti (2011), dan Zuliarti (2012).

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,220 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Ini berarti hipotesis nol ditolak sehingga hipotesis keempat dapat diterima. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Arifianti (2011), dan Sukmaningrum (2012).

**Tabel 9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis		Kesimpulan
H <sub>1</sub>	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima
H <sub>2</sub>	Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima
H <sub>3</sub>	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima
H <sub>4</sub>	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima

Sumber : data primer diolah 2013

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Besarnya pengaruh keempat variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 45,3%. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan hipotesis pertama (H1) dapat diterima, maka variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SDM yang bernilai 0,186 dengan tingkat signifikansi 0,032. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi SDM, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pernyataan hipotesis kedua (H2) dapat diterima, maka variabel penerapan SAK berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SAK yang bernilai 0,548 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan SAK, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pernyataan hipotesis ketiga (H3) dapat diterima, maka variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel TI yang bernilai 0,198 dengan tingkat signifikansi 0,029. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pemanfaatan TI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Pernyataan hipotesis keempat (H4) dapat diterima, maka variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel SPI yang bernilai 0,289 dengan tingkat signifikansi 0,030. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi penerapan SPI, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Kuesioner dinyatakan valid dan reliable. Sedangkan data yang dihasilkan memenuhi asumsi klasik, dimana secara keseluruhan berarti memenuhi syarat dan dapat diterima.

Keterbatasan penelitian ini adalah distribusi kuesioner saat responden sedang bekerja sehingga tingkat pengembalian kuesioner hanya 64%. Atas dasar keterbatasan tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode lain selain kuesioner, seperti wawancara langsung sehingga peneliti dapat lebih meyakini jawaban yang diberikan responden mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu disarankan pula untuk memperluas variabel independen yang akan diteliti, misalnya komitmen organisasi, kepemimpinan dan kultur organisasi. Serta memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam bidang organisasi sektor publik.

## REFERENSI

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Program Sarjana UNDIP. Semarang.
- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi I. (BPFE UGM, Yogyakarta).
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilton, Perry Roy dan Charlotte Brownlow. 2004. SPSS Explained. East Sussex: Routledge.
- Husna, Fadhilah. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). Program Sarjana UNP. Padang.
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, Rr S. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kumorotomo, Wahyu. 2005. Akuntabilitas dalam teori dan praktek. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadhirsyah. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Vol. 3. No. 2. 206-220.
- Roviyanti, Devi. 2009. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Program Sarjana Universitas Siliwangi.
- Peraturan Pemerintah, 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP nomor 8 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP nomor 60 Tahun 2008.
- Rahman, Fajar Aditya. 2012. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)" .*Skripsi.Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.



- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Riyanto, B. 2003. Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi FE UTY* Yogyakarta. No: 9. April. 330-342.
- Subaweh, Imam. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Program Pasca Sarjana Gunadarma. Jakarta.
- Warsito dan Ghozali, I. 2002. "Pengaruh Sistem Pengendalian terhadap Prestasi Kerja : Uji langsung dan tidak langsung, (studi empiris pada perusahaan manufaktur otomotif di Indonesia). Tesis Program Pasca sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang (Tidak Dipublikasikan).
- Wiranto, Tatag : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik.
- World Bank, "Strengthening Local Government in Sub-Saharan Africa," *EDI Policy Seminar Report* No. 21, Washington DC, 1989.
- World Bank, *Governance and Development*, Washington, D.C., 1992.
- Yuliarta. 2013. Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Program Sarjana UNP. Padang